



SKRIPSI

Judul:

**DASAR PENINJAUAN PERUBAHAN DALUWARSA
PENGAJUAN KOMPENSASI
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
103/PUU-XXI/2023**

Disusun oleh:

**DIMAS WIJANARKO
NIM. 205210216**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

**DASAR PENINJAUAN PERUBAHAN
DALUWARSA PENGAJUAN
KOMPENSASI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
103/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Dimas Wijanarko
NIM : 205210216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : DIMAS WIJANARKO
NIM : 205210216
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : DASAR PENINJAUAN PERUBAHAN DALUWARSA
PENGAJUAN KOMPENSASI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XXI/2023
Title : THE LEGAL BASIS FOR REVIEWING THE STATUTE OF
LIMITATIONS ON COMPENSATION CLAIMS IN THE
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 103/PUU-
XXI/2023

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

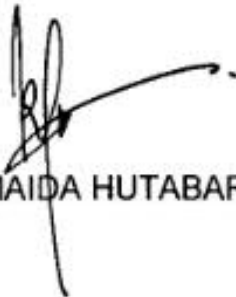
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.

NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

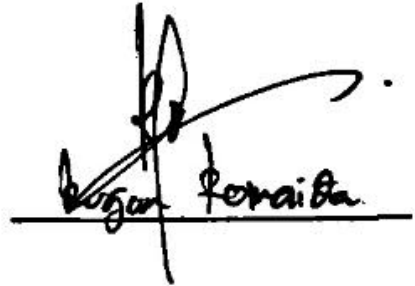
Persetujuan

Nama : Dimas Wijanarko
NIM : 205210216
Program Studi : HUKUM
Judul : DASAR PENINJAUAN PERUBAHAN DALUWARSA
PENGAJUAN KOMPENSASI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-
XXI/2023

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 16 Desember 2024

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rugun Romaida', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI :

DASAR PENINJAUAN PERUBAHAN DALUWARSA PENGAJUAN KOMPENSASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XXI/2023

NAMA MAHASISWA : Dimas Wijanarko

NIM : 205210216

KATA KUNCI : Kompensasi, Terorisme, Korban, Daluwarsa, *Lex Certa*.

ISI ABSTRAK : Kompensasi merupakan elemen penting dalam kerangka hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme. Pengajuan kompensasi adalah hak penuh korban untuk memulihkan hak-hak mereka yang hilang akibat tindakan terorisme. Namun, pelaksanaan kompensasi di Indonesia menghadapi tantangan administratif yang berpotensi merugikan korban, khususnya terkait pembatasan waktu 3 tahun yang ditetapkan oleh Pasal 43L ayat (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian skripsi ini menerapkan jenis penelitian hukum berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian komparatif, mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan, pendekatan penelitian melalui pendekatan komparatif, dan teknik analisis data secara kualitatif. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 memperpanjang batas waktu pengajuan menjadi 10 tahun terhitung sejak tanggal UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlaku, norma tersebut tidak memberikan fleksibilitas bagi korban yang mengalami trauma berat dan tidak memperhatikan *ius constituendum* dalam kebijakan mengenai batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang terjadi di masa lalu. Sebagai pembanding, kebijakan di Perancis menetapkan waktu pengajuan kompensasi berdasarkan keterangan medis yang memastikan korban dapat mengajukan klaim kapan saja selama keterangan tersebut memuat pernyataan bahwa memang benar alasan korban membutuhkan kompensasi adalah karena dampak dari tindak pidana terorisme. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip *Lex Certa* yang mengutamakan kejelasan dan kepastian hukum. Untuk meningkatkan keadilan bagi korban, Indonesia perlu mempertimbangkan pembatasan waktu yang lebih adaptif dan merumuskan norma hukum secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Reformasi hukum yang berorientasi pada pemulihan korban akan mendukung perlindungan hak-hak konstitusional secara lebih optimal.

ABSTRACT

THESIS TITLE :

THE LEGAL BASIS FOR REVIEWING THE STATUTE OF LIMITATIONS ON COMPENSATION CLAIMS IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 103/PUU-XXI/2023

AUTHOR'S NAME : Dimas Wijanarko

NIM : 205210216

KEYWORDS : Compensation, Terrorism, Victim, Statute of Limitations, Lex Certa.

ABSTRACT CONTENT : Compensation is a crucial element within the legal framework to ensure justice and protection for victims of terrorism-related crimes. The right to file for compensation is a fundamental entitlement for victims to restore their rights lost due to terrorist acts. However, the implementation of compensation in Indonesia faces administrative challenges that may disadvantage victims, particularly regarding the three-year time limit set by Article 43L paragraph (4) of the Law on the Eradication of Terrorism Crimes. This thesis research applies a type of legal research in the form of normative juridical with comparative research specifications, collecting data and information through library studies, a research approach using a comparative approach, and qualitative data analysis techniques. Although the Constitutional Court Decision No. 103/PUU-XXI/2023 extended the filing period to 10 years from the enactment of the Law on the Eradication of Terrorism Crimes, this provision does not provide flexibility for victims suffering from severe trauma and does not take into account *ius constituendum* in the statute of limitations for compensation claims from past terrorism victims. In contrast, the French policy sets the compensation filing period based on medical testimony, allowing victims to submit claims at any time as long as the medical statement confirms that the need for compensation is directly linked to the impact of a terrorist crime. This approach aligns more closely with the principle of *Lex Certa*, which prioritizes clarity and legal certainty. To enhance justice for victims, Indonesia needs to consider more adaptive time limitations and carefully craft legal provisions to avoid uncertainty. Legal reforms focused on victim recovery will better support the protection of constitutional rights.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“DASAR PENINJAUAN PERUBAHAN DALUWARSA PENGAJUAN KOMPENSASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XXI/2023”**. Tugas akhir skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada pihak yang telah berkontribusi dan mendukung penulisan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang bersedia menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing Peneliti secara menyeluruh dari awal hingga akhir tahap penulisan skripsi.
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Orang tua Peneliti yang telah melahirkan dan membesarkan Peneliti, bekerja keras membiayai perkuliahan Peneliti, serta mendorong peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Saudara Peneliti, yaitu Dizzy Virginia, Destian Monica, dan Stephanie Trianti yang telah mendukung dan mendengarkan keluh kesah peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Keluarga besar Peneliti yang senantiasa mendukung dan mendorong peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Sahabat dekat Peneliti, yaitu Shelly Wu, Kevin Wu, dan Audrey Lauren yang telah menemani peneliti, memberi masukan kepada peneliti, dan mendengarkan keluh kesah peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan sekaligus rekan satu pembimbing, yaitu Filshella Goldwen dan John Michael yang kami sebut dengan panggilan akrab Leo, yang telah menjadi teman diskusi, membantu, membimbing, dan memberi masukan kepada Peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung Peneliti selama perkuliahan.

Penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang sangat disadari oleh Peneliti. Oleh karena itu, Peneliti menerima kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan pembaca.

Jakarta, 14 Desember 2024

Dimas Wijanarko

Pernyataan

Nama : DIMAS WIJANARKO
NIM : 205210216
Program Studi : HUKUM
Judul : DASAR PENINJAUAN PERUBAHAN DALUWARSA
PENGAJUAN KOMPENSASI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-
XXI/2023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024
Yang menyatakan



DIMAS WIJANARKO
NIM, 205210216

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II KERANGKA TEORETIS	28
A. Teori Kepastian Hukum	28
B. <i>Equality before the law</i>	29

C. Teori Pemulihan	31
D. Teori Efektivitas Hukum	33
E. <i>Lex Certa</i> sebagai Aspek dari Asas Legalitas	36
F. <i>Penal Policy</i>	37
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	43
1. Pengaturan HAM dan Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia ...	43
2. Pengaturan Kompensasi dalam Hukum Positif Indonesia	45
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023	52
4. Pendapat Ahli, Pemerintah, Lembaga, dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 terkait HAM dan Kompensasi	54
5. Pengaturan HAM dan Kompensasi dalam Hukum Internasional dan Negara Luar	71
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	87
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR LAMPIRAN	140

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Konseptual	12
---------	---------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Besaran Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu	118
---------	--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Kerangka Konseptual	12
Gambar 3.1	: Data Persebaran Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu di Indonesia	63
Gambar 3.2	: Contoh Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme	65
Gambar 3.3	: Pengajuan Kompensasi Prancis melalui FGTI	74
Gambar 3.4	: Alur Prosedur Pertama Kompensasi FGTI	75
Gambar 3.5	: Alur Prosedur Kedua Kompensasi FGTI	75
Gambar 3.6	: Alur Prosedur Ketiga Kompensasi FGTI	76
Gambar 3.7	: Alur Pengajuan Keempat Kompensasi FGTI	77
Gambar 3.8	: Alur Payment Methods Kompensasi FGTI	78
Gambar 3.9	: Klasifikasi Kerusakan yang ditanggung FGTI	79
Gambar 3.10	: Klasifikasi Kerusakan Biaya Rumah Sakit FGTI	80
Gambar 3.11	: Klasifikasi Kerusakan Kehilangan Pendapatan FGTI	81
Gambar 3.12	: Support FGTI terhadap pembiayaan masa depan Korban	81
Gambar 3.13	: Klasifikasi Kerusakan Pengadaptasian FGTI	82
Gambar 3.14	: Klasifikasi Kerugian Psikologis sementara FGTI	83
Gambar 3.15	: Klasifikasi Kerugian Psikologis permanen FGTI	83
Gambar 3.16	: Klasifikasi Kerugian Psikososial FGTI	84
Gambar 3.17	: Tujuan Kompensasi Menurut FGTI	84
Gambar 3.18	: Batas Waktu Baru Untuk Klaim Baru dalam Kompensasi FGTI	84
Gambar 3.19	: Kompensasi FGTI tidak dikenakan Pajak	85

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUTer	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
UUPSK	: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
PP Kompensasi	: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
PMK103	: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023
HAM	: Hak Asasi Manusia
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MK	: Mahkamah Konstitusi
ECHR	: <i>European Convention on Human Rights</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
SMPL	: Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UN	: <i>United Nations</i>
FGTI	: <i>Guarantee Fund for Victims of Terrorist Acts and other Offences</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: <i>Letter of Acceptance</i> Jurnal Sinta 3
Lampiran 9	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023